



Mekanisme Pencairan Dana melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada Aplikasi Sakti di BPBPK Provinsi Banten

Fund Disbursement Mechanism Through a Payment Order (SPP) in the Sakti Application at BPBPK of Banten Province

Vanni Fatimah Zahroh^{1*}, Intan Maharani², Sri Ayadilah Akhdzulhijah³,
Purnama Fidyah Handayani⁴, Nurul Rif'ah⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email : vannizahra9@gmail.com¹, intanmahar28@gmail.com², sriayadilah@gmail.com³,
purnamafdyh01@gmail.com⁴, nurul290923@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: vannizahra9@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 Januari 2026;

Revisi: 15 Februari 2026;

Diterima: 04 Maret 2026;

Tersedia: 07 Maret 2026

Keywords: *Accountability; Fund Disbursement Mechanism; Public Financial Management; SAKTI; SPP.*

Abstract: *This study examines the fund disbursement mechanism through the Payment Order (SPP) using the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) at the Building, Infrastructure, and Area Development Agency (BPBPK) of Banten Province. The background of this research is the increasing demand for transparent, accountable, and efficient public financial management through digital systems in government institutions. The objective of this study is to analyze the procedural stages, identify potential risks, and evaluate the effectiveness of the SAKTI application in supporting the disbursement process. This research employed a descriptive qualitative method through direct observation, documentation review, and interviews conducted during the internship program. The findings indicate that the SPP mechanism is implemented systematically, starting from document verification, data input in the payment module, uploading supporting documents, system validation, to submission to the State Treasury Office. The implementation of SAKTI enhances transparency, traceability, and internal control; however, challenges such as incorrect account coding, incomplete documentation, and occasional system disruptions were identified. Mitigation efforts including checklist implementation and double-checking procedures help reduce these risks. The study implies that digital financial systems significantly contribute to strengthening accountability and efficiency in public sector financial management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencairan dana melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi langsung, studi dokumentasi, dan wawancara selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pencairan dana telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi, dimulai dari verifikasi dokumen, input data pada modul pembayaran, unggah dokumen pendukung, validasi sistem, hingga pengiriman ADK ke KPPN. Implementasi aplikasi SAKTI meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta ketertelusuran transaksi keuangan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala seperti kesalahan input kode akun, ketidaklengkapan dokumen, dan gangguan teknis sistem. Upaya mitigasi dilakukan melalui penerapan checklist kelengkapan dokumen, mekanisme *double checking*, serta pengaturan waktu input untuk menghindari gangguan server. Secara keseluruhan, penggunaan SAKTI mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara di BPBPK Provinsi Banten serta memperkuat sistem pengendalian internal instansi.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Negara; Pencairan Dana; SAKTI; SPP.

1. PENDAHULUAN

Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Provinsi Banten merupakan unit pelaksana teknis pemerintah merupakan organisasi operasional yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan kebijakan pusat, termasuk dalam hal pengelolaan infrastruktur dan penataan bangunan, sehingga keberadaan balai menjadi sangat penting dalam menjembatani kebijakan dan pelaksanaan di daerah (Soeharto, Iman, 2015). Dalam menjalankan tugasnya, balai tidak hanya berfokus pada aspek teknis konstruksi, tetapi juga pada tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Salah satu aspek krusial dalam mendukung kelancaran program pembangunan tersebut adalah mekanisme pencairan dana melalui Surat Perintah Pembayaran (*SPP*) yang terintegrasi dalam aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Pengelolaan keuangan sektor publik yang baik harus didukung oleh sistem administrasi yang terintegrasi dan akuntabel agar dapat menjamin ketepatan waktu realisasi anggaran serta meminimalisir kesalahan administrasi (Mardiasmo, 2018). Proses ini menjadi titik sentral dalam siklus pengelolaan keuangan negara karena menentukan ketepatan waktu realisasi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akurasi pelaporan keuangan. Keterlambatan, kesalahan administrasi, atau ketidaksesuaian prosedur dalam pengajuan *SPP* dapat berdampak langsung pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, bahkan berpotensi menimbulkan temuan audit.

Di era digitalisasi tata kelola pemerintahan, penggunaan aplikasi SAKTI bukan sekadar transformasi sistem manual ke sistem elektronik, tetapi juga menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap alur kerja, tanggung jawab setiap pihak, serta integrasi data antar modul. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme pencairan dana melalui *SPP* menjadi sangat penting, baik dari sisi administratif maupun dari perspektif pengendalian internal. Sistem pengelolaan keuangan publik yang berbasis teknologi informasi memerlukan pemahaman yang baik dari para pelaksana, terutama yang berkaitan dengan prosedur administrasi dan pengendalian interna, agar dapat meminimalisir kesalahan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Mardiasmo, 2018). Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi menuntut pemahaman pengguna terhadap alur proses dan tanggung jawab masing-masing pihak agar sistem dapat berjalan efektif dan mendukung pengendalian internal organisasi (Romney, Marshall B., & Steinbart, Paul John, 2015).

Dengan melalui kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Provinsi Banten, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung implementasi mekanisme tersebut. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah. Dengan demikian, kajian mengenai mekanisme pencairan dana melalui SPP pada aplikasi SAKTI menjadi relevan dan memiliki urgensi tinggi, karena berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan instansi pemerintah.

2. METODE

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis proses mekanisme pencairan dana melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada aplikasi SAKTI di Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Banten. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena melalui pengumpulan data yang kaya dan analisis yang sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh tentang proses yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena fokus pembahasan hanya pada satu instansi, yaitu mekanisme SPP di BPBPK Provinsi Banten. Studi kasus memungkinkan analisis yang mendalam terhadap suatu unit atau fenomena tertentu dalam konteks nyata, sehingga dapat memahami kompleksitas alur kerja dan kendala yang terjadi secara menyeluruh. Dengan kombinasi metode deskriptif kualitatif, observasi partisipatif, dan studi kasus, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pencairan dana melalui SPP pada aplikasi SAKTI (Yin, Robert K, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Observasi langsung

Observasi langsung merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti dapat memperoleh gambaran proses, rutinitas, dan perilaku secara menyeluruh, yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena dengan lebih tepat (Moleong, L. J, 2017). Mengamati secara langsung proses verifikasi dokumen, penginputan data pada aplikasi SAKTI, dan proses validasi SPP.

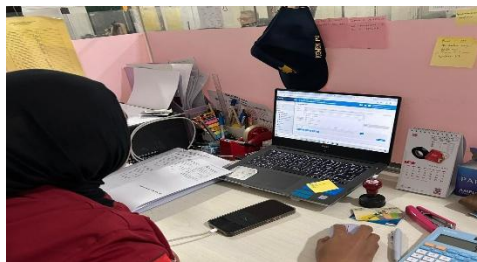


Gambar 1. Observasi Langsung.

Sumber: Zahroh, 2026

Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif dalam penelitian kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang lebih kaya karena peneliti mengalami langsung konteks, interaksi, dan perilaku subjek penelitian (Nasution, S, 2003), yang dimana ikut terlibat dalam pengarsipan dokumen, penyusunan lampiran SPP, serta membantu input data pada modul pembayaran SAKTI.

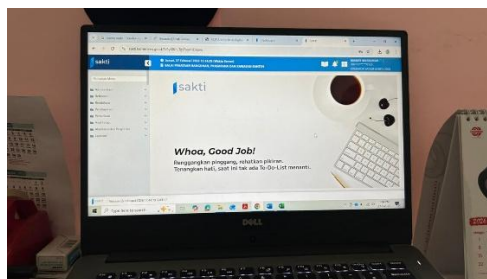


Gambar 2. Partisipasi Aktif.

Sumber: Zahroh, 2026

Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang ada, baik dokumen resmi maupun non-resmi, sebagai bahan untuk memperoleh data yang akurat dan mendukung analisis penelitian (Arikunto, S, 2013).



Gambar 3. Tampilan Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI.

Sumber: Zahroh, 2026



Gambar 4. Proses Verifikasi Dokumen SPP.

Sumber: Zahroh, 2026



Gambar 5. Proses Input SPP.

Sumber: Zahroh, 2026



Gambar 6. Arsip SPP.

Sumber: Zahroh, 2026

Studi Literatur

Studi Literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan empiris dari penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat merancang kerangka pemikiran dan metode penelitian secara lebih tepat. referensi (Sutopo, H. B., 2006). Peraturan Menteri Keuangan tentang SAKTI dan modul pelaksanaan anggaran sebagai dasar teori.

Teknik Analisis Data

a. Mengidentifikasi alur proses penerbitan SPP

Mengidentifikasi alur proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) merupakan langkah awal untuk memahami tahapan administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemahaman alur kerja keuangan penting untuk memastikan ketepatan waktu, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi (Mardiasmo, 2018). Dengan mengidentifikasi alur, peneliti dapat mengetahui prosedur dari pengajuan SPP, verifikasi dokumen, hingga pencairan dana

b. Membandingkan prosedur teori pengelolaan keuangan negara dengan praktik di lapangan.

Membandingkan teori dengan praktik di lapangan penting untuk menilai efektivitas penerapan prosedur (Romney, Marshall B., & Steinbart, Paul John, 2015). Perbandingan ini memungkinkan peneliti menilai kesesuaian sistem informasi akuntansi dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi penyimpangan atau kendala dalam praktik.

c. Mengidentifikasi Kendala Teknis dan Administratif dalam Penggunaan Aplikasi SAKTI

Identifikasi kendala teknis dan administratif penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi. SAKTI merupakan sistem terintegrasi untuk pengelolaan keuangan negara, namun tantangan seperti kesalahan input data, keterlambatan verifikasi, dan kurangnya pemahaman modul dapat memengaruhi kelancaran pencairan SPP (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021).

d. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil observasi.

Rekomendasi perbaikan merupakan langkah akhir untuk meningkatkan kinerja sistem. Hasil observasi dan analisis lapangan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi yang bersifat praktis dan aplikatif, sehingga sistem berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi (Creswell, J. W, 2014)

Analisis Risiko Proses SPP

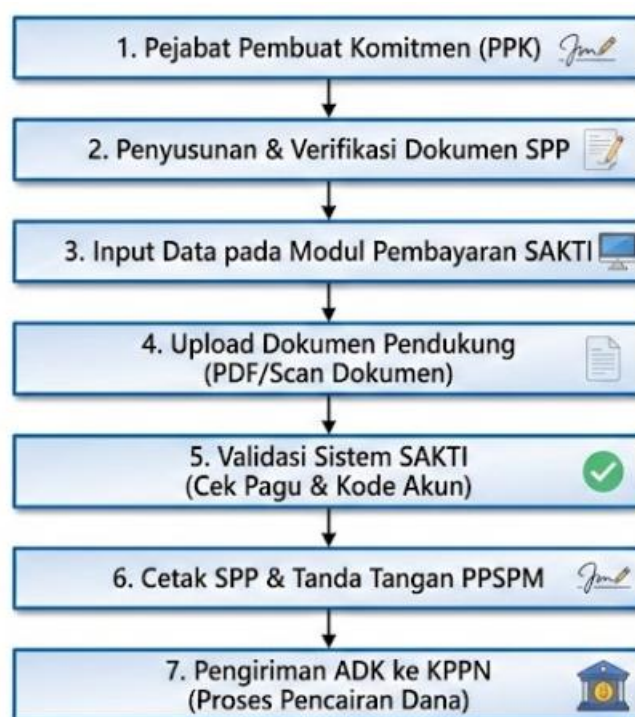
Setiap tahapan memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran proses penyerapan anggaran. Risiko tersebut dapat berasal dari aspek administratif, teknis sistem, maupun faktor eksternal seperti gangguan server. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi risiko serta upaya pencegahan yang tepat agar proses penerbitan SPP berjalan efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis berikut menggambarkan tahapan proses SPP beserta risiko, dampak, dan langkah mitigasi yang dilakukan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek di BPBPK Provinsi Banten.

Tabel 1. Analisis Proses SPP.

Tahapan	Risiko	Dampak	Upaya Pencegahan
Verifikasi Dokumen	Dokumen tidak lengkap	SPP ditolak	<i>Checklist</i> kelengkapan
Input Data SAKTI	Salah kode akun	Pagu minus	<i>Double checking</i>
<i>Upload</i> Dokumen	File tidak terbaca	Validasi gagal	<i>Scan</i> PDF standar
Validasi Sistem	<i>Server down</i>	Proses tertunda	Input di jam tidak sibuk

Sumber: Zahroh, 2026

3. HASIL



Gambar 7. Diagram Alur Mekanisme Penerbitan SPP.

Sumber: Zahroh, 2026

Berdasarkan hasil identifikasi risiko pada setiap tahapan mekanisme pencairan dana melalui SPP di aplikasi SAKTI, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

Tahap verifikasi dokumen merupakan titik krusial awal

Ketidaklengkapan dokumen menjadi risiko yang paling sering terjadi. Dampaknya adalah penolakan SPP sebelum masuk ke tahap sistem. Oleh karena itu, penggunaan *checklist* kelengkapan dokumen terbukti membantu meminimalkan kesalahan administratif.

Kesalahan input kode akun berpotensi menimbulkan pagu minus

Pada tahap input data di aplikasi SAKTI, ketelitian menjadi faktor utama. Kesalahan satu digit pada kode akun (COA) dapat menyebabkan ketidaksesuaian anggaran. Upaya *double checking* sebelum validasi sistem efektif mencegah kesalahan tersebut.

Digitalisasi dokumen memerlukan standar teknis yang jelas

File yang tidak sesuai format (misalnya ukuran terlalu besar atau tidak terbaca) dapat menyebabkan validasi gagal. Penggunaan standar scan PDF yang seragam mempercepat proses unggah dan validasi.

Faktor teknis system mempengaruhi kecepatan proses

Gangguan server atau koneksi pada jam sibuk dapat menunda validasi SPP. Strategi penginputan pada jam tidak padat pengguna terbukti membantu mempercepat proses.

4. DISKUSI

Pelaksanaan mekanisme pencairan dana melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada aplikasi SAKTI di BPBPK Provinsi Banten menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan telah berjalan secara terstruktur dan terdigitalisasi. Berdasarkan hasil observasi, proses dimulai dari verifikasi dokumen, input data pada modul pembayaran, hingga validasi sistem sebelum pencetakan SPP dan pengiriman ADK ke KPPN. Secara teoritik, pengelolaan keuangan sektor publik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo, 2018).

Implementasi aplikasi SAKTI sebagai sistem terintegrasi mendukung prinsip tersebut karena seluruh transaksi terekam secara digital dan dapat ditelusuri kembali (*traceable*). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti ketidaksesuaian dokumen pendukung dan potensi kesalahan input kode akun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah digital, faktor ketelitian sumber daya manusia tetap menjadi penentu keberhasilan proses pencairan dana.

Dari hasil pengamatan, penggunaan *checklist* kelengkapan dokumen dan mekanisme *double checking* sebelum validasi sistem terbukti efektif meminimalkan risiko pagu minus dan penolakan SPP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SAKTI tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga pada kontrol internal dan kompetensi pengelola keuangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) di BPBPK Provinsi Banten, mekanisme pencairan dana melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada aplikasi SAKTI berjalan secara terstruktur, terstandarisasi, dan terintegrasi digital, sehingga setiap transaksi dapat diawasi, diverifikasi, dan ditelusuri kembali. Penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi meningkatkan efektivitas pengendalian internal karena setiap aktivitas tercatat secara sistematis dan mudah untuk diaudit (Hall, J. A, 2015). Keberhasilan implementasi sistem digital sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam melakukan verifikasi dokumen, penginputan data, dan memastikan kesesuaian prosedur dengan aturan yang berlaku (Widodo, R, 2016).

Sistem canggih sekalipun tidak akan optimal tanpa ketelitian dan pemahaman petugas yang menjalankan prosedur. Lebih lanjut, implementasi SAKTI sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi, keterlambatan pencairan, maupun penyalahgunaan anggaran (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021). Dengan demikian, kombinasi antara sistem digital yang efektif dan SDM yang terlatih menjadi kunci keberhasilan mekanisme pencairan SPP di BPBPK Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil observasi, risiko yang sering muncul meliputi ketidaklengkapan dokumen, kesalahan kode akun, dan kendala teknis sistem. Upaya pencegahan seperti penggunaan checklist kelengkapan berkas, *double checking* sebelum validasi, serta pengaturan waktu input pada jam tidak sibuk terbukti efektif dalam meminimalkan hambatan tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini memberikan pemahaman nyata mengenai pentingnya pengendalian internal dan ketelitian administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. Pengalaman ini juga meningkatkan kompetensi penulis dalam memahami siklus pelaksanaan anggaran berbasis sistem digital di instansi pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Andhika, L. R. (2022). Digital transformation in Indonesian public financial management. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 1–12.
- Arifin, Z., & Prasetyo, A. (2023). Implementation of SAKTI application in improving financial accountability. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145–160.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (edisi ke-4). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). *Petunjuk teknis aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi*

Keuangan Tingkat Instansi). Jakarta.

- Fadilah, S., & Rahayu, N. (2021). Public sector financial management reform in Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(3), 321–338.
- Hall, J. A. (2015). *Sistem informasi akuntansi*. Cengage Learning.
- Hidayat, T., & Sari, D. (2022). Internal control effectiveness in government institutions. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 255–270.
- Iskandar, R., & Lestari, D. (2023). E-government and transparency in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 45–60.
- Kusuma, A., & Wibowo, H. (2024). Risk management in public financial systems. *Jurnal Keuangan Negara*, 18(1), 33–50.
- Lestari, M., & Rahman, F. (2021). Digitalization of public financial services in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 44(9), 745–758.
- Mahendra, Y., & Putri, A. (2022). Implementation challenges of government financial information systems. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 101–115.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode research*. Tarsito.
- Nugroho, R., & Santoso, B. (2023). Government accounting reform and digital integration. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(3), 210–225.
- Pratama, R., & Dewi, S. (2024). Financial accountability and digital governance in Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.85>
- Rahmawati, E., & Hapsari, D. (2021). Implementation of accrual-based accounting in Indonesian public sector. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 17(2), 88–105.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem informasi akuntansi*. Pearson.
- Sari, N., & Wijayanti, P. (2022). Effectiveness of financial information systems in public institutions. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 9(1), 60–74.
- Setiawan, D., & Firmansyah, I. (2023). Public financial management modernization in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 150–165.
- Soeharto, I. (2015). *Manajemen proyek konstruksi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan praktik*. Universitas Sebelas Maret Press.
- Utami, R., & Kurniawan, T. (2024). Strengthening internal control through digital financial systems. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 28(1), 77–92.
- Wahyuni, S., & Purnomo, A. (2021). Accountability in public sector financial reporting. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 120–135.
- Widodo, R. (2016). *Manajemen keuangan publik: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.

Yin, R. K. (2014). *Penelitian studi kasus: Desain dan metode* (edisi ke-5). Sage Publications.